



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Penelitian terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka berupa penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu yang yang dipilih disesuaikan dengan konsep-konsep dan premis-premis yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini (Kriyantono, 2006, p. 81). Dalam hal ini, penulis memilih beberapa penelitian yang memiliki premis mengenai penggunaan satire dalam media dan pemanfaatannya di media massa.

Tinjauan pustaka digunakan untuk alat analisis penulis (Kriyantono, 2006, p. 81). Oleh karena itu, penulis perlu memakai beberapa penelitian terdahulu untuk menganalisis topik-topik yang relevan sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini bisa melengkapi pula penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini:

- a. Menertawakan Politik: Anak Muda, Satire dan Parodi dalam Situs Mojok.co

Artikel ini dibuat oleh Wisnu Prasetya Utomo pada tahun 2015 dan dimuat dalam jurnal studi pemuda yang merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada. Di dalam artikel ini, Wisnu menjelaskan bagaimana peran dan manfaat dari satire dalam sebuah media. Untuk penelitian ini, Wisnu mengambil contoh media yang menggunakan gaya satire ialah Mojok.co.

Menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan analisis artikel, Wisnu ingin mengungkapkan bahwa media dengan gaya satire bisa menjadi pilihan bagi khalayak untuk mendapatkan media alternatif selain media-media *mainstream* yang sudah ada. Di dalam

penelitian ini, Wisnu memberi pernyataan bahwa media *mainstream* telah dikuasai oleh elite politik sehingga terjadinya konglomerasi media tak terelakkan. Oleh karena itu, hegemoni informasi yang didapatkan dari para konglomerat media bisa dihindari dengan adanya media bergaya satire yang memberi ruang untuk keluar dari kejenuhan tersebut (Utomo, 2015, p. 195).

Wisnu juga mengatakan bahwa media satire hadir atas kejenuhan politik dan ketidakpercayaan khalayak pada jurnalisme itu sendiri (Utomo, 2015, p. 197). Wisnu mengatakan bahwa situasi ini telah dipahami oleh pendiri Mojok.co sendiri. Hal ini menjadikan pendiri Mojok.co untuk membuat sebuah media alternatif yang bisa menjadi ruang ide dalam bentuk artikel opini bergaya satire. Selama ini, media alternatif semacam itu belum dirasakan kehadirannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, media bergaya satire dinilai dapat tumbuh di tengah media-media *mainstream*. Ada dua hal yang mendasari kesimpulan tersebut, antara lain kejenuhan hegemoni informasi dan perkembangan internet.

Dalam hal hegemoni sendiri, Mojok.co dinilai mampu mengatasi kejenuhan khalayak terhadap hegemoni informasi yang dibawakan media-media *mainstream* (Utomo, 2015, p. 203). Khalayak seakan sudah paham bahwa informasi yang diberikan oleh media-media *mainstream* merupakan bagian dari kepentingan elite pimpinannya. Mojok.co berhasil mendapatkan hati khalayaknya karena mereka juga mampu mengangkat informasi-informasi yang sensitif.

Selain hegemoni informasi, media satire Mojok.co bisa berkembang seiring dengan perkembangan internet (Utomo, 2015, p. 203). Penelitian ini mengatakan bahwa perkembangan internet menyebabkan semakin mudahnya Mojok.co untuk menjangkau pembacanya anak muda hingga pelosok-pelosok daerah. Selain itu, Mojok.co juga bisa sekaligus

berinteraksi dengan khalayak dan dengan mudahnya khalayak mampu menyebarkan konten satire Mojok.co.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang disusun oleh penulis. Kesamaan tersebut terletak pada topik penelitian yang membicarakan satire dalam media. Selain itu, teknik pengumpulan data yang dipakai pun sama dengan melakukan wawancara mendalam.

Selain memiliki kesamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang sedang disusun. Dalam penelitian ini, Wisnu meneliti sebuah media yang memang menyebutkan medianya sebagai media satire dengan artikel-artikel opini. Sedangkan penulis memakai media yang dikenal sebagai media *mainstream* dengan berita-berita faktualnya. Selain itu, medium yang digunakan kedua media ini juga berbeda antara *online* dan cetak.

b. *Journalism Under Attack: The Charlie Hebdo Covers and Reconsiderations of Journalistic Norms*

Artikel yang ditulis oleh Joy Jenkins dan Edson C. Tandor Jr ini telah diterbitkan oleh Sage pada tahun 2017 dalam jurnal *Journalism*. Topik pembahasan dalam artikel ini adalah mengenai sampul majalah *Charlie Hebdo* yang menyebabkan serangan pada jurnalis media tersebut dan keputusan media lainnya dalam menampilkan sampul majalah tersebut kembali dalam berita serangan terhadap jurnalis *Charlie Hebdo*. Dalam kasus ini, media *online* seperti *BuzzFeed*, *The Huffington Post*, dan *The Daily Beast* secara cepat menerbitkan ulang ilustrasi milik *Charlie Hebdo*, sedangkan media seperti *Associated Press*, *The New York Times*, dan CNN memutuskan tidak menampilkan kembali ilustrasi kontroversial tersebut (Jenkins & Tandoc Jr., 2017, p. 2).

Joy dan Edson dalam penelitian ini berfokus pada keputusan media terhadap publikasi ulang ilustrasi milik *Charlie Hebdo*. Dalam hal ini terkait dengan etika jurnalis, otonomi jurnalis, serta penggabungan antara

otonomi, etika, dan gambar. Hubungan antara visual dan etika sering kali menimbulkan masalah dalam publik. Dalam artikelnya yang berjudul *Ethis and Images: Five Major Concerns*, Paul Martin Lester mengatakan bahwa peran jurnalis untuk menghasilkan kata-kata dan gambar seringkali mengganggu pembaca dan pemirsa. Lester juga menambahkan jika dilakukan dengan cara yang merugikan tanpa pembenaran yang memadai dan dapat dipertahankan harus dilarang secara etis (Jenkins & Tandoc Jr., 2017, p. 5).

Dalam artikel ini, Joy dan Edson membagi berdasarkan wilayah media yang mempublikasikan ulang atau tidak gambar kontroversial dari *Charlie Hebdo*. Mereka berasumsi media di negara-negara Eropa melihat kontroversi kartun sebagai masalah kebebasan pers, sedangkan sebagian besar media di Amerika tidak melakukan publikasi pada gambar kontroversial. Pada salah satu kasus kartun mengenai Nabi Muhammad di salah satu media Denmark, *The New York Times* berpendapat bahwa tidak melakukan penerbitan gambar tersebut dikarenakan bisa menjadi bagian dalam serangan pada simbol agama (Jenkins & Tandoc Jr., 2017, p. 6).

Artikel ini juga memuat pernyataan yang menyebutkan bahwa gambar kontroversi justru melawan norma-norma jurnalistik yang mendukung inklusivitas multikultural. Hal ini dikarenakan gambar-gambar tersebut mengangkat pertanyaan tentang kebencian dan mendorong khalayak untuk memarginalkan dan mendiskriminasi. (Jenkins & Tandoc Jr., 2017, p. 6). Argumen tersebut menunjukkan bahwa jurnalis harus mengistimewakan norma kesopanan untuk membantu melestarikan daya tarik media secara lebih luas (Jenkins & Tandoc Jr., 2017, p. 6).

Joy dan Edson memfokuskan penelitian ini pada keputusan media di Amerika Serikat terkait publikasi ulang ilustrasi kontroversial dari *Charlie Hebdo*. Dengan berfokus pada hal tersebut, penelitian ini melihat bagaimana norma dalam jurnanisme mempengaruhi keputusan media-

media tersebut. Dalam hal ini, otonomi jurnalisme menemui tantangannya untuk mengambil keputusan etis yang tidak merugikan seperti contohnya sensor diri (Jenkins & Tandoc Jr., 2017, p. 7).

Topik dalam artikel ini memiliki kemiripan dengan apa yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini. Kemiripan itu terletak pada penggunaan ilustrasi dalam sampul yang berbentuk satire. Hanya saja, artikel ini berfokus pada keputusan redaksional terkait penerbitan salah satu sedangkan penulis berfokus pada analisis resepsi mahasiswa terkait penggunaan ilustrasi pada sampul.

Pada artikel ini, metode yang digunakan memakai pendekatan yang sama dengan penulis yaitu kualitatif. Hanya saja, metode yang digunakan berbeda dengan yang penulis pakai untuk penelitian ini. Joy dan Edson memakai metode analisis isi tekstual sedangkan penulis memakai metode studi kasus.

Pada bagian teknik pengumpulan data, teknik yang dilakukan oleh Joy dan Edson sama dengan teknik yang akan dilakukan oleh penulis yaitu wawancara mendalam. Namun, ada perbedaan pada subjek yang akan diwawancara. Joy dan Edson memilih pihak redaksional sebagai subjek yang akan diwawancara sedangkan penulis memilih pembaca yang akan diwawancara secara mendalam.

Hasil penelitian ini menghasilkan empat wacana utama yang mencirikan media di Amerika Serikat memilih menerbitkan ulang atau tidak ilustrasi milik *Charlie Hebdo* (Jenkins & Tandoc Jr., 2017, p. 8). Empat wacana tersebut, antara lain menghindari pelanggaran, menginformasikan kepada publik, melindungi keamanan jurnalis dan menunjukkan solidaritas pada jurnalis *Charlie Hebdo*.

- c. Studi Resepsi Mahasiswa *Broadcasting* Universitas Mercu Buana Pada Film Journalism “*Kill The Messenger*”.

Artikel ini telah terbit dalam Jurnal Komunikasi milik Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2017. Diteliti oleh Ahmad Toni dan Dwi Fajariko, artikel ini meneliti tentang konstruksi makna yang dibangun oleh mahasiswa *broadcasting* Universitas Mercu Buana terhadap isi film “*Kill The Messenger*”. Ahmad dan Dwi melihat bagaimana makna dari film tersebut diterima oleh mahasiswa *broadcasting* untuk setiap *scene*-nya (Toni & Fajariko, 2017, p. 151).

Penelitian Ahmad dan Dwi ini menggunakan metode analisis resepsi milik Stuart Hall. Mereka menggunakan elemen utama pemaknaan, yaitu dominan makna, oposisi makna, dan negosiasi makna. Pemaknaan ini diambil dari makna yang dilakukan oleh subjek yang diteliti. Mereka juga menggunakan teknik triangulasi data, yaitu daftar pertanyaan tertulis, wawancara, dan diskusi setelah menonton film sehingga pemaknaan didapatkan lebih menyeluruh (Toni & Fajariko, 2017, p. 151).

Film “*Kill The Messenger*” dipilih oleh Ahmad dan Dwi karena film yang menceritakan tentang seorang jurnalis yang dinilai jarang diproduksi dalam dunia perfilman (Toni & Fajariko, 2017, p. 152). Berdasarkan film dengan tema yang dirasa jarang diproduksi ini, Ahmad dan Dwi melihat pemaknaan film tersebut menurut mahasiswa yang berkecimpung di dunia jurnalistik, dalam hal ini mahasiswa *broadcasting*. Dengan demikian, mahasiswa *broadcasting* sudah memiliki pemaknaan mengenai jurnalis sebelumnya dan melihat bagaimana pemaknaan tersebut disandingkan dengan pemaknaan yang diterima dari film tersebut.

Hasil dari yang didapatkan dari penelitian milik Ahmad dan Dwi ini menunjukkan adanya pemaknaan dominan dimana tidak ada perbedaan penafsiran antara produsen dan konsumen. Hal ini dikarenakan film ini berdasarkan kisah nyata sehingga sesuai dengan sikap jurnalis pada umumnya. Dalam hal ini, pemaknaan mengenai seorang jurnalis memang harus berani dalam mencari informasi untuk berita yang akan ditulis dan

harus jujur dalam memberitakan informasi yang telah didapatkan kepada khalayak (Toni & Fajariko, 2017, p. 162).

Walaupun terdapat banyak pemaknaan dominan, namun penelitian ini juga menyatakan ada pemaknaan negosiasi maupun oposisi yang terjadi. Pemaknaan negosiasi terletak pada bagian jurnalis harus mementingkan keselamatan dirinya dan orang terdekat. Untuk pemaknaan oposisi lebih menjelaskan bahwa keberanian dan kejujuran jurnalis yang menyebabkan tidak mementingkan risiko yang akan didapat (Toni & Fajariko, 2017, p. 162).

Dari penelitian milik Ahmad dan Dwi ini, terdapat kesamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang hendak dilakukan. Dalam hal ini, metode penelitiannya adalah studi resepsi milik Stuart Hall dengan teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam. Perbedaannya adalah objek yang diteliti, yaitu antara film dan ilustrasi satire.

2.2. Konsep *Encoding/Decoding* Stuart Hall

Konsep *encoding/decoding* pertama kali dikemukakan oleh Stuart Hall. Saat itu Stuart Hall berpendapat bahwa riset komunikasi massa tradisional hanya terfokus pada level pertukaran pesan. Dalam hal ini, tidak ada konsepsi yang jelas tentang ‘momen-momen berbeda sebagai struktur relasi yang kompleks’ (Hall, 2011, p. 213).

Meskipun konsep ini tidak membatasi riset dengan hanya mengikuti petunjuk yang datang dari analisis isi, momen enkoding dan dekoding merupakan momen yang telah ditentukan batas-batasnya (Hall, 2011, p. 214). Hal ini berkaitan dengan bentuk pesan dari sebuah peristiwa yang akan diberikan dari sumber ke penerima. Momen pembentukan tersebut bukan

momen acak yang diambil semauanya. Oleh karena itu, perlu diintegrasikan ke dalam relasi proses komunikasi sosial secara keseluruhan.

Pada tahap tertentu, sebuah penyiaran harus menghasilkan pesan-pesan yang diencodekan dalam bentuk diskursus yang bermakna (Hall, 2011, p. 216). Setelah itu, pesan tersebut didekodekan agar memiliki efek untuk memenuhi kebutuhan. Efek tersebut bisa bermacam-macam, seperti menghibur, memengaruhi, dan mengajari.

Kode dekoding dan encoding mungkin tidak simetris secara sempurna (Hall, 2011, p. 217). Kesimetrisan inilah yang menyebabkan kesalahpahaman dari pesan yang dibentuk oleh penulis untuk khalayak. Hal ini berkaitan dengan penggunaan kode yang bisa diidentifikasi atau tidak. Ketidakidentifikasi inilah yang dapat menyebabkan distorsi dari apa yang telah ditransmisikan.

Dari proses encoding dan dekoding tersebut, Stuart Hall menyebutkan ada tiga bentuk hubungan antara penulis dan pembaca serta bagaimana pesan itu dibaca oleh keduanya, antara lain (Eriyanto, 2011, p. 94):

a. Pembacaan Dominan

Pada posisi ini, kode-kode yang telah dibuat oleh penulis dapat diterima oleh pembacanya. Hal ini menyebabkan pembaca mampu menafsirkan pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis sehingga tidak ada perbedaan penafsiran. Posisi ini dapat terbentuk ketika penulis menggunakan kode profesional bisa dalam bentuk kode budaya maupun posisi politik yang sudah menjadi kepercayaan pembaca. Dengan menggunakan kode-kode yang profesional tersebut memberi dampak tidak ada perbedaan yang tajam di antara para pembaca.

b. Pembacaan yang Dinegosiasikan

Tidak terdapat pembacaan dominan di posisi ini. Penulis juga memakai kode yang dipercayai oleh khalayak namun tidak memiliki pengertian secara umum. Oleh karena itu, khalayak memakai kepercayaan dan keyakinannya

masing-masing lalu dikompromikan dengan kode yang sudah disediakan oleh penulis.

c. Pembacaan Oposisi

Posisi ini berlawanan dengan pembacaan dominan. Dalam posisi ini, pembaca memaknai berbeda atau berseberangan dengan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada khalayak. Hal ini bisa terjadi karena penulis tidak menggunakan kerangka acuan budaya atau kepercayaan politik pembacanya.

Tiga bentuk hubungan penulis dan pembaca ini erat kaitannya dengan posisi ideologi penulis dan pembaca (Eriyanto, 2011, p. 96). Jika ada kesamaan ideologi antara pembaca dan penulis, maka pembaca tidak hanya menyetujui kode yang dibuat penulis tetapi juga dinikmati dan dikonsumsi pembaca teks. Sebaliknya, ideologi yang berbeda antara penulis dan pembaca menimbulkan adanya ketidaksukaan pada kode yang dibuat oleh penulis dari khalayak.

2.3. Teori Agenda Setting

Berdasarkan pengertian secara etimologi, *agenda setting* bisa dipahami sebagai pengaturan atau penyusunan agenda/acara/kegiatan (Ritonga, 2018, p. 33). Salah satu teori dalam ilmu komunikasi ini erat hubungannya dengan pengaruh media massa. Media massa terkadang memiliki peran untuk menyusun agenda tersebut.

Teori agenda setting membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut (Ritonga, 2018, p. 34). Media menyampaikan berita atau informasi tidak hanya sebagai pengetahuan saja melainkan bisa mengubah perilaku, opini, dan gaya hidup masyarakat berdasarkan agenda yang dibuat. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan apa yang diberitakan oleh media hingga menjadi bahan pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjadi salah satu tokoh teori ini, audiens tidak hanya mempelajari berita-berita dan hal-hal

lainnya melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tersebut (Rohim, 2016, p. 192). Hal ini menandakan bahwa audiens sejatinya mengetahui bahwa ada agenda yang sengaja diciptakan oleh media massa dalam suatu informasi. Sebagai contoh hal ini terjadi pada media massa yang menjadi partisipan politik yang sengaja memiliki agenda seperti kampanye salah satu calon pemimpin dalam sebuah kontestasi.

Asumsi dari teori ini juga memiliki kelebihan karena mudah dipahami dan relatif mudah untuk diuji (Rohim, 2016, p. 193). Hal yang menjadi dasar ialah topik yang ada di media massa dan mendapat banyak perhatian dari audiens. Dari topik tersebut dapat diuji bagaimana sebuah media massa memasukkan agenda dalam topik tersebut.

Pada awal perkembangannya, riset dengan teori agenda setting murni digunakan untuk riset kuantitatif. Susunan urutan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dioperasionisasikan dalam tradisi kuantitatif dengan konsep seperti agenda media dan agenda publik. Namun dalam perkembangannya, agenda setting bisa dilengkapi dengan studi kualitatif sebagai pelengkap awal, analisis proses maupun efek lanjutan (Rohim, 2016, p. 194).

Dalam teori agenda setting, terdapat 3 dimensi yang perlu dikaji, salah satunya agenda media. Agenda media ini lebih melihat berapa jumlah dan tingkat penonjolan yang diperlihatkan dalam sebuah informasi atau berita. Tingkat penonjolan bagi khalayak yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak dan valensi yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu berita (Rohim, 2016, pp. 194 - 195).

Dalam penelitian ini, teori *agenda setting* digunakan untuk mengetahui agenda yang dibuat oleh redaksi Koran *Tempo* dalam bentuk ilustrasi satire. Hal ini dikarenakan dalam sebuah ilustrasi satire tentunya ada makna yang ingin

disampaikan. Makna tersebut yang perlu diketahui sebelum mengetahui resepsi khalayak dalam penelitian ini.

2.4. Media Massa

Media massa merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa (Muhtadi, 2016, p. 54). Hal ini dikarenakan komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada beberapa orang yang tersebar tidak di suatu wilayah. Oleh karena itu, media massa menjadi alat yang digunakan, seperti televisi, majalah, koran, dan sebagainya.

Dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi massa memiliki ciri penting, salah satunya komunikasi berlangsung satu arah (Muhtadi, 2016, p. 54). Dengan demikian, respons dari penerima pesan tidak dapat dilihat secara langsung. Selain itu, penerima pesan juga tidak bisa mengubah atau menanyakan secara langsung maksud dari pesan yang disampaikan. Penerima pesan hanya bisa menerima pesan dan mencatat hal-hal penting ataupun menarik.

Dalam menyampaikan pesannya, komunikator media massa bertindak atas nama lembaga atau organisasi (Muhtadi, 2016, p. 55). Oleh karena itu, sebelum pesan disampaikan melalui media, terlebih dahulu pesan tersebut diolah oleh beberapa orang yang memiliki peran berbeda. Contohnya, ada seorang wartawan yang menyusun kata-kata, fotografer yang memvisualisasikan pesan yang sudah dibuat dan ada editor yang menjadi *gatekeeping* sebelum pesan dipublikasikan.

Selain itu, pesan yang disampaikan di media massa pun bersifat umum (Muhtadi, 2016, p. 55). Segala pesan yang diberikan mengandung persoalan-persoalan yang sekiranya diketahui oleh banyak orang. Hanya saja, beberapa media massa memiliki segmentasi pasar tertentu. Oleh karena itu, ada beberapa pesan yang sekiranya relevan dengan segmentasinya namun tetap merupakan informasi yang bisa diketahui oleh banyak orang.

Dalam penerapannya, media massa memiliki beberapa fungsi. Rata-rata fungsi media secara umum baik dalam bentuk cetak maupun elektronik bersifat sama. Namun, untuk memainkan fungsinya setiap media memiliki strategi komunikasi masing-masing tergantung bentuk medianya (Muhtadi, 2016, p. 63).

Fungsi-fungsi media, antara lain menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan memengaruhi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, khususnya fungsi memengaruhi pers, pers dapat melakukan kontrak sosial secara bebas dan bertanggung jawab (Muhtadi, 2016, p. 62).

Untuk memenuhi fungsi tersebut, pers memasukkan opini pentingnya lewat berita secara implisit dan memasukkannya pada kolom editorial serta artikel-artikel secara eksplisit (Muhtadi, 2016, p. 63). Oleh karena itu, beberapa media terkadang memunculkan karikatur agar menarik untuk fungsi menghibur dan bisa membentuk opini publik untuk fungsi memengaruhi.

Berbicara tentang fungsi pers, media massa dinilai cukup efektif dan ekstensif untuk melakukan kontrol sosial (Rivers, Jensen, & Peterson, 2003, p. 39). Hal ini dianggap oleh sebagian pengamat menjadi sebuah kekuatan utama media. Media dianggap mampu untuk mengubah bentuk kontrol sosial yang ada di masyarakat.

Dewasa ini, beberapa bentuk media massa mengalami perubahan. Terlebih ketika televisi hadir ditambah dengan adanya internet yang semakin memperluas cakupan komunikasi massa (Rivers, Jensen, & Peterson, 2003, p. 20). Seperti contoh keberadaan koran yang dianggap segera berakhir namun nyatanya masih bisa bertahan dengan munculnya bentuk *e-paper*. Hal ini dikarenakan membidik sasaran yang tepat dengan bentuk medianya.

2.5. Literasi Politik

Definisi dari literasi politik adalah sebuah upaya untuk memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para kontestan, bagaimana

kecenderungan mereka mempengaruhi diri (Heryanto, Literasi Politik: Dari Normativitas ke Tindakan, 2012, p. 117). Hal ini menjadikan praktik literasi politik ini menjadi sebuah kekuatan politik bagi warganegara. Partisipasi politik warganegara yang kritis sangat dibutuhkan untuk memberdayakan konsep utama politik yang memiliki dampak bagi kehidupan warga.

Literasi politik bukanlah semata konsep normatif, melainkan bauran antara pengetahuan, skill, dan sikap politik (Heryanto, Literasi Politik: Dari Normativitas ke Tindakan, 2012, p. 109). Menurut pendapat Bernard Crick dalam *Essays on Citizenship*, literasi politik merupakan sebuah cara untuk membuat diri sendiri menjadi efektif dalam kehidupan publik (Heryanto, Literasi Politik: Dari Normativitas ke Tindakan, 2012, p. 117). Oleh karena itu, literasi politik mendorong publik untuk ikut berpartisipasi melakukan hak dan kewajiban politik dalam keadaan yang resmi maupun sukarela.

Dalam literasi politik, ada dua hal yang menjadi muatan pokok. Kedua hal tersebut antara lain, partisipasi politik dan pemahaman kritis warga terhadap hal-hal pokok terkait politik. Dua muatan ini menjadi ketrampilan bagi warga agar bisa berpartisipasi agar pejabat pemerintah berpikir mereka tidak bisa jadi pejabat selama tidak ada warga (Heryanto, Literasi Politik: Dari Normativitas ke Tindakan, 2012, p. 118).

Dalam hal ini, partisipasi politik yang dimaksud ialah ikut ambil bagian dalam kehidupan politik seperti pemilihan umum, mempengaruhi kebijakan publik dan sebagainya. Partisipasi politik ini berhubungan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan mencapai tujuan itu, dan sistem kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan kegiatan, tingkatan, partisipasi politiknya, dan tinggi rendahnya partisipasi politik, partisipasi politik dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain (Sastroadmodjo, 1995, pp. 8-10):

- a. Berdasarkan kegiatannya, partisipasi politik dibedakan menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Perbedaan dari kedua hal ini

terletak pada orientasi partisipasinya. Partisipasi politik pasif hanya berorientasi pada aspek keluaran sebuah sistem politik, sedangkan partisipasi politik aktif berorientasi pada aspek masukan dan keluaran sistem politik.

- b. Berdasarkan tingkatannya, bentuk partisipasi politik dibagi menjadi apatis, spektator, dan gladiator. Apatitis berarti bersikap masa bodoh dan tidak menaruh perhatian sekecil apa pun terhadap aktivitas politik. Spektator masih memiliki perhatian dengan kehidupan politik minimal ikut memilih dalam pemilihan umum. Terakhir, gladiator bisa dibilang paling aktif karena terlibat dalam seluruh proses politik.
- c. Berdasarkan jumlah pelaku, partisipasi politik dibagi menjadi dua, antara lain partisipasi individu dan partisipasi kolektif.
- d. Berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi politik, dikategorikan menjadi partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi yang tidak aktif. Keempat hal ini dibedakan oleh tingkat kesadaran politik dan kepercayaan pada sistem politik. Aktif berarti kesadaran politik dan kepercayaan pada sistem politik sama-sama tinggi. Apatitis berarti kesadaran politik ada namun kepercayaan pada sistem politik sangat rendah. Militan radikal berarti kesadaran politik tinggi dan kepercayaan pada sistem politik rendah. Terakhir, tidak aktif berarti kesadaran politik sangat rendah namun kepercayaan pada sistem politik sangat tinggi.

Muatan pokok kedua dalam literasi politik ialah pemahaman kritis warga terhadap hal-hal terkait politik. Dalam hal ini, masyarakat perlu mengetahui macam-macam kegiatan dalam sistem politik yang menentukan tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perlu diketahui bahwa ada beberapa konsep pokok terkait, politik antara lain negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian dan alokasi (Budiardjo, 1998, pp. 9-

13). Selain itu, ada juga lima pandangan terhadap politik, antara lain usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, segala hal berkaitan penyelenggaraan negara, cara mempertahankan kekuasaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan konflik untuk mencari dan mempertahankan sumber yang dianggap penting (Surbakti, 1992, p. 2).

Setelah memahami norma pokok dalam literasi politik, fokus selanjutnya terdapat pada langkah aksi yang harus dilakukan (Heryanto, Literasi Politik: Dari Normativitas ke Tindakan, 2012, p. 122). Terdapat empat pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, masyarakat didorong untuk mampu mendefinisikan kebutuhan informasi politik. Kedua, menetapkan strategi investigasi pada semua proses politik. Ketiga, gerakan untuk mengkomunikasikan informasi yang terkait dengan peran media untuk publikasi. Terakhir, evaluasi produk dari akhir proses politik.

Terkait dengan peran media, adanya asosiasi yang kuat diperlukan untuk mengawasi sekaligus menjadi kekuatan untuk penyeimbang (Heryanto, Literasi Politik: Dari Normativitas ke Tindakan, 2012, p. 122). Seperti contoh, meliputi kampanye politik yang bisa menjadi dokumentasi segala janji sehingga menjadi informasi yang identik.

Berdasarkan empat pendekatan tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan yang bisa diakses langsung masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini menjadi tawaran kegiatan literasi politik, seperti antara lain (Heryanto, Literasi Politik: Dari Normativitas ke Tindakan, 2012, p. 123):

- a. Mendaftar dan menganalisis isu kontemporer melalui teknik CFR (*Conclusion, Finding, Recommendation*).
- b. Membuat *peer group* untuk sharing dan melakukan aksi bersama
- c. Melakukan Pendidikan politik untuk memperbesar *public attentive*.
- d. Mempublikasikan tulisan yang fokus menganalisis dinamika politik.

- e. Menginisiasi merespons opini publik terkait kebijakan publik.

Konsep ini digunakan untuk mengetahui literasi politik dari khalayak yang diteliti pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan kemampuan khalayak dalam memahami isu politik bisa mempengaruhi bagaimana khalayak memahami ilustrasi satire yang diteliti pada penelitian ini. Posisi resepsi khalayak bisa ditentukan pula dengan literasi politik khalayak.

2.6. Satire Dalam Media

Konten satire menjadi sebuah model yang bisa menjadi alternatif berita konvensional pada umumnya. Dalam pers, konten satire parodi menyimpan format liputan berita utama - tata letak berita utama, struktur berita, gaya linguistik - tetapi kontennya dengan jelas memarodikan kenyataan (Ermida & Chovanec, 2012). Berita dengan model satire ini juga tidak harus mematuhi konvensi berita dan pemrograman acara terkini dengan demikian bebas untuk memberikan perspektif dan kritik alternatif (Basu, 2018). Dengan demikian, konten satire ini bisa bebas ditulis asal masih mencakup kaidah-kaidah penulisan berita. Dari isinya pun, konten satire identik dengan perspektif baru yang terkadang memberi kritik pada suatu masalah.

Satire sendiri merupakan istilah di zaman Yunani. Saat itu, Aristophanes dan Menippus dari Gadara mengembangkan istilah satire menjadi serangan terhadap kejahatan manusia (Ermida & Chovanec, 2012). Dalam masa penguasa Romawi, Horace dan Juvenal yang menciptakan dua tradisi penting dalam satire. Satire dalam tradisi Horatian dianggap lebih bersahabat dibandingkan tradisi Juvenalian. Dalam Horatian, satire yang muncul ringan seperti mempermanis koreksi moral dengan humor. Sedangkan dalam tradisi Juvenalian, satiranya dimaksudkan untuk memberi rasa takut dan sangat keras.

Konten satire baru-baru ini sering menghubungkan popularitas satire politik dan berita krisis kepercayaan publik terhadap politisi dan jurnalis (Basu, 2018). Di sini juga jaringan menawarkan program yang secara bersamaan mendekonstruksi media dan politisi konservatif melalui kritik parodi dan lucu (Jones, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa memang politik menjadi tujuan awal dari konten satire itu hadir. Kehadirannya juga dapat membantu kritik dan membantu memahami beritanya (Basu, 2018). Berita yang memiliki gaya satire memang bisa dikatakan lebih ringan sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan berita-berita pada umumnya.

Menurut produser televisi The Danish Mikael Bertelsen, tren ini mungkin mempertanyakan kebutuhan politik satire sebagai genre hiburan tertentu (Bruun, 2012). Maksudnya, tren konten satire semakin menegaskan bahwa khalayak membutuhkan politik satire untuk menjadi alternatif baru dalam genre hiburan. Hal ini berarti konten satire cukup diminati oleh khalayak.

Adanya konten satire juga diklaim memiliki tujuan untuk secara langsung menghasut tindakan untuk perubahan sosial dan pendapat lain juga menyebutkan bahwa konten satire digunakan untuk menyalurkan kemarahan atas ketidakadilan ke dalam bentuk humor yang dapat diterima (Basu, 2018). Dengan hal ini, ada tujuan baik dari konten satire untuk memberi kesadaran pada masyarakat akan adanya ketidakadilan. Dari situ masyarakat bisa menciptakan konsensus yang kritis atas sebuah permasalahan yang ada.

Hadirnya konten satire juga tak luput dari pengaruh perkembangan teknologi. Teknologi yang berkembang menyebabkan tersebarnya informasi yang bisa diakses oleh publik. Dengan jumlah informasi yang jauh lebih besar sekarang tersedia untuk umum, dan hierarki budaya produksi sekarang rata (sebagian besar berkat kemajuan teknologi dan melek teknologi yang lebih luas), posisi jurnalisme dalam masyarakat lebih singkat, dan diperebutkan oleh

berbagai keluaran media (termasuk, tentu saja, komedi dan sindiran) (Harrington, 2011).

Konten satire muncul dalam berbagai bentuk mulai dari komedi tengah malam hingga mengejek siaran berita seperti *The Daily Show* untuk mencetak jurnalisme seperti *The Onion* (M. Stevens & McIntyre, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa konten satire dapat dituangkan dalam bentuk apa pun. Hanya saja, media televisi paling sering menjadi produk yang dipakai untuk memakai berita-berita dengan bergaya satire. Ini membuktikan konten satire lebih mudah diproduksi secara visual karena pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan mudah.

2.7. Alur Penelitian

Penelitian ini berawal dari kebijakan pemerintah terkait revisi undang-undang KPK. Dalam hal ini presiden dan DPR menghendaki adanya revisi terhadap undang-undang no. 30 tahun 2002. Revisi tersebut menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan ada beberapa poin yang dirasa mampu melemahkan KPK dengan adanya revisi tersebut.

Kritik besar sempat terjadi dari gerakan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPR-RI pada 23-24 September 2019. Salah satu poin yang diutarakan dalam aksi tersebut ialah menolak revisi undang-undang KPK. Aksi tersebut juga memicu mahasiswa-mahasiswa di beberapa daerah untuk melakukan aksi yang sama.

Gerakan yang masif tersebut tampaknya tidak membuat pemerintah mengurungkan adanya revisi undang-undang KPK. Nyatanya revisi tetap dilakukan dan disahkan menjadi undang-undang no. 19 tahun 2019. Aksi lanjutan dengan meminta presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai pengganti revisi undang-undang

tersebut juga dilakukan. Namun, aksi tersebut tidak membuahkan hasil karena presiden tidak mengeluarkan perppu tersebut.

Isu kebijakan pemerintah ini tentu tidak luput dari laporan media. Selama September 2019, topik ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan oleh seluruh media baik televisi, cetak, maupun *online*. Beberapa kali, topik ini pula menjadi *headline* di beberapa media.

Salah satu media yang turut memberitakan topik revisi undang-undang KPK ialah koran *Tempo*. Selama September 2019, koran *Tempo* mengangkat topik KPK dan salah satunya revisi undang-undang KPK. Topik revisi undang-undang KPK tidak hanya disajikan dalam bentuk artikel biasa oleh koran *Tempo*. Media ini juga memakai ilustrasi satire untuk membahas topik revisi undang-undang KPK.

Penggunaan ilustrasi satire di media *mainstream* Indonesia masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan penggunaan ilustrasi satire dinilai mampu menimbulkan konflik. Hal ini berkaitan dengan resepsi khalayak yang dinilai mampu memiliki pemahaman berbeda antara produsen dari redaksi koran *Tempo* dan khalayak yang membaca koran *Tempo* edisi revisi undang-undang KPK.

Dari praktik penggunaan ilustrasi satire tersebut, penelitian ini hendak melihat pemahaman khalayak terkait ilustrasi satire yang terdapat dalam *sampul story* koran *Tempo* edisi revisi undang-undang KPK. Khalayak yang diambil dalam penelitian ini yaitu mahasiswa. Hal ini dikarenakan ada keterkaitan antara topik revisi undang-undang KPK dengan mahasiswa yang sempat melakukan gerakan aksi untuk menolak revisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan studi resepsi Stuart Hall dengan *decoding* dan *encoding*nya. Dalam hal ini *encoding*nya adalah redaksi koran *Tempo* dan *decoding*nya adalah mahasiswa dengan medianya ilustrasi satire. Setelah itu, peneliti mencari tahu posisi mahasiswa dalam resepsinya terhadap ilustrasi

satire yang digunakan oleh koran *Tempo* edisi revisi UU KPK. Ada 3 posisi menurut Stuart Hall, yaitu posisi dominan, negosiasi, dan oposisi.

Bagan 2.1. Alur penelitian resepsi Stuart Hall

